

Penguatan Kapasitas Digital Pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau melalui Sosialisasi Literasi dan Penyediaan Infrastruktur Teknologi

Sena Putra Prabujaya^a, Dimes Akbar Perdana^{a,*}, Novitry Pratiwi^a, Galuh Efnol Adzan^a, Safitri Elfandari^b

^aProgram Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Jl. Palembang-Prabumulih, KM.32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662

^bProgram Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Jl. Palembang-Prabumulih, KM.32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662

Abstract

The development of digital technology requires village governments to have adequate digital literacy skills to improve the quality of public services and encourage the realization of smart villages. However, limited literacy among village government officials and the lack of technological infrastructure in the form of stable internet network access pose challenges in Tanjung Baru Ranau Village. This Community Service activity aims to strengthen the digital capacity of village government officials through digital literacy socialization and the provision of technological infrastructure. The implementation method includes socialization, provision and assistance with the installation of technological infrastructure, and evaluation. The results of the activity showed an increase of 158.62% in the average score from 5.8 in the pre-test to 15 in the post-test in the knowledge and skills of village officials related to internet use, as well as the use of technology in public services. The provision of technological infrastructure also strengthens access and readiness of village infrastructure to support digital transformation and is a strategic step towards the implementation of digital-based governance and smart village development.

Keywords: capacity building, digital literacy, technology

Abstrak

Perkembangan teknologi digital menuntut pemerintah desa untuk memiliki kemampuan literasi digital yang memadai agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terwujudnya *smart village*. Namun, keterbatasan literasi aparatur pemerintah desa dan minimnya infrastruktur teknologi berupa akses jaringan internet yang stabil menjadi tantangan di Desa Tanjung Baru Ranau. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas digital aparatur pemerintah desa melalui sosialisasi literasi digital dan penyediaan infrastruktur teknologi. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, penyediaan dan pendampingan instalasi infrastruktur teknologi, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan sebesar 158,62% pada skor rata-rata dari 5,8 pada *pre-test* menjadi 15 pada *post-test* dalam pengetahuan dan keterampilan aparatur desa terkait penggunaan internet, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Penyediaan infrastruktur teknologi juga memperkuat akses dan kesiapan infrastruktur desa dalam mendukung transformasi digital serta menjadi langkah strategis menuju implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pembangunan *smart village*.

Kata Kunci: peningkatan kapasitas, literasi digital, teknologi

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam tata kelola pemerintahan baik pusat maupun daerah (Fitri Rahmadany, 2024). Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, pemerintah mendorong seluruh institusi pemerintahan, termasuk di tingkat desa, untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik untuk memperluas akses informasi dan memperkuat kapasitas pemerintahan dalam memberikan layanan berbasis digital kepada masyarakat. Layanan digital sangat penting, karena transformasi digital tidak mengalihkan layanan ke platform digital, namun juga

*Corresponding author:

E-mail address: dimesakbarperdana@fisip.unsri.ac.id



mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan guna menciptakan proses yang bernilai tambah dan meningkatkan kepuasan pengguna (Septiana et al., 2022). Dalam penerapannya, adaptasi dan peningkatan kapasitas digital penting untuk memastikan publik dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Kapasitas digital merujuk pada kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi infrastruktur teknologi yang memadai, seperti perangkat teknologi dan ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil (Maulana et al., 2024); Rio Yusri Maulana, 2022).

Percepatan transformasi digital di tingkat pemerintah desa merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif (Septiana et al., 2022). Namun, realitasnya tidak semua desa memiliki kesiapan baik dari aspek sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses tersebut (Maulana et al., 2024). Desa Tanjung Baru Ranau merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan dengan pemandangan alam yang asri menjadikan desa ini memiliki peluang untuk pengembangan sektor pariwisata, pertanian, serta pengelolaan sumber daya lokal. Akan tetapi, dari sisi tata kelola pemerintahan, desa ini masih menghadapi hambatan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan aparat pemerintah desa, diketahui bahwa Desa Tanjung Baru Ranau menghadapi sejumlah kendala dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis digital. Permasalahan utamanya adalah masih minimnya pemahaman dan keterampilan perangkat desa terhadap literasi digital dan teknologi informasi yang berdampak pada kurangnya pemanfaatan aplikasi dan sistem administrasi berbasis digital. Aparatur desa belum sepenuhnya terbiasa menggunakan perangkat digital untuk mendukung pelayanan publik, pengelolaan data, maupun penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, kondisi geografis Desa Tanjung Baru Ranau yang terletak di dataran tinggi memiliki tantangan aksesibilitas, terutama dalam hal jaringan internet. Akses jaringan internet yang tidak stabil menjadi salah satu alasan pemerintah desa kesulitan untuk menerapkan pelayanan berbasis digital kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada terbatasnya transparansi informasi, serta pelayanan masih dilakukan secara konvensional.

Dalam konteks pemerintahan digital, literasi digital dan *capacity building* menjadi dua pilar fundamental dalam mendukung transformasi tata kelola berbasis teknologi. Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola perubahan secara berkelanjutan. Menurut Heeks & Santos, (2020), keberhasilan implementasi sistem informasi di sektor publik sangat ditentukan oleh kesesuaian (*design reality gap*) antara kapasitas institusi, kesiapan pengguna, serta konteks sosial-organisasional. Perspektif ini diperkuat oleh Margetts & Dunleavy, (2013) dalam kerangka *Digital Era Governance*, yang menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan mensyaratkan integrasi antara teknologi, organisasi, dan kompetensi aparat untuk menghasilkan layanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi.

Di sisi lain, literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup dimensi kognitif, etis, dan sosial dalam mengakses, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab (Gunawan et al., 2025; van Dijk, 2005). Dalam konteks sektor publik, literasi digital aparat menjadi prasyarat penting dalam mendukung efektivitas pelayanan berbasis elektronik, transparansi, serta partisipasi masyarakat (Gil-Garcia et al., 2018; Perdana & M. Husni Thamrin, 2025). Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi digital, khususnya di wilayah pedesaan, masih menjadi hambatan struktural dalam implementasi *e-government*, yang berimplikasi pada terbatasnya pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik (Permana, 2023; S. Hasanah et al., 2023).

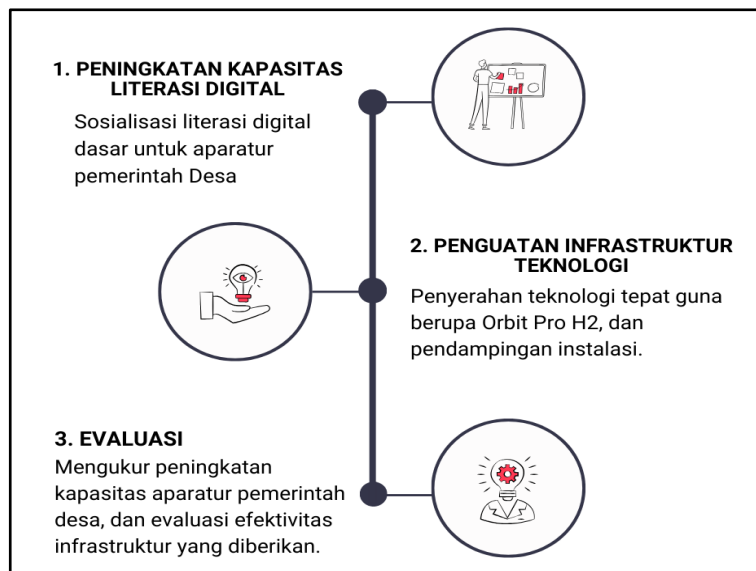
Lebih lanjut, penguatan kapasitas (*capacity building*) dalam konteks pemerintahan digital tidak dapat dipahami semata sebagai pelatihan teknis, melainkan sebagai proses multidimensional yang mencakup pengembangan kompetensi individu, penguatan struktur organisasi, serta penyediaan ekosistem pendukung berbasis teknologi (Kanni, 2009). Studi Mergel et al., (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik sangat bergantung pada kombinasi antara peningkatan kapasitas aparat dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai, peningkatan kapasitas individu tidak akan menghasilkan perubahan kinerja yang signifikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital harus dilakukan secara simultan melalui intervensi edukatif, penyediaan infrastruktur teknologi, serta penguatan kelembagaan guna memastikan keberlanjutan transformasi digital di tingkat pemerintahan desa.

Di Desa Tanjung Baru Ranau, kondisi geografis menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas digital aparat desa serta penyediaan infrastruktur teknologi pendukung.

Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai respons atas kesenjangan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan literasi digital aparatur pemerintah desa, menyediakan infrastruktur teknologi pendukung, serta mengevaluasi peningkatan kapasitas digital aparatur desa melalui pendekatan *pre-test* dan *post-test*.

2. Metode

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan berbasis masyarakat (*community-based service*), yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat dalam hal ini aparatur Pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau sebagai mitra aktif dalam seluruh proses kegiatan. Model ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan lapangan yang menuntut keterlibatan langsung aparatur desa dalam mengidentifikasi permasalahan, menyepakati solusi, serta terlibat secara penuh dalam proses peningkatan kapasitas digital. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Baru Ranau pada 28 Oktober 2025 melalui 3 (tiga) metode yang saling menunjang, yaitu : sosialisasi, penyediaan dan pendampingan instalasi infrastruktur teknologi, serta evaluasi. Ketiga metode tersebut dirancang untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak hanya dapat dipahami oleh aparatur pemerintah desa, tetapi juga dapat diimplementasikan serta dimanfaatkan secara berkelanjutan.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun uraian tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Sosialisasi

Tahap sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya literasi digital dan urgensi digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan publik desa kepada seluruh aparatur pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung dengan aparatur desa guna memperkenalkan pentingnya literasi digital, serta mengkomunikasikan alur dan manfaat kegiatan. Partisipasi mitra dalam tahap ini berperan penting untuk membangun rasa memiliki terhadap program (Akbar & Wijaya, 2024). Selain itu, dilakukan pula sesi diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah desa menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun masukan terkait program yang dilaksanakan.

2.2. Penyediaan dan Pendampingan Instalasi Infrastruktur Teknologi

Tahap selanjutnya adalah penyediaan dan pendampingan instalasi infrastruktur teknologi berupa modem Orbit Pro H2 Telkomsel. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan pendampingan instalasi/penerapan teknologi penyediaan jaringan internet melalui modem Orbit Pro H2 Telkomsel. Pemilihan teknologi mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan keterjangkauan agar dapat dioperasikan oleh mitra secara mandiri (Marzuki A & Dewi IS, 2023).

2.3. Evaluasi

Tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana program memberikan dampak pada kemampuan aparatur desa. Evaluasi dilakukan dengan *pre-test* dan *post-test* untuk menilai peningkatan literasi digital serta observasi langsung terhadap penggunaan sistem dalam operasional desa. Analisis hasil *pre-test* dan *post-test* dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai rata-rata sebelum dan sesudah intervensi. Peningkatan kapasitas diukur melalui selisih skor rata-rata (*mean difference*) antara *pre-test* dan *post-test*. Selain itu, hasil observasi digunakan sebagai data kualitatif untuk memperkuat interpretasi perubahan perilaku aparatur dalam pemanfaatan teknologi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kegiatan pengabdian. Evaluasi ini penting agar program tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga transformatif (Dian Pratama et al., 2025; Yusuf M & Andini R, 2023). Selanjutnya, hasil evaluasi dianalisis oleh tim pengabdian sebagai bahan untuk mengetahui keberhasilan program dan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sosialisasi Literasi Digital dan Penyerahan Buku Panduan Pemanfaatan Internet dan UMKM dalam Pengembangan Desa Cerdas

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Kapasitas Digital Pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau melalui Sosialisasi Literasi dan Penyediaan Infrastruktur Teknologi” menunjukkan bahwa proses peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tidak dapat dilepaskan dari dua konsep utama, yaitu *capacity building* dan literasi digital. Kedua konsep ini saling berkaitan dan menjadi landasan teoretis sekaligus praktis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang adaptif dan berbasis teknologi. Secara konseptual, *capacity building* dipahami sebagai proses sistematis yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi literasi digital merupakan tahapan awal dalam upaya penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Sosialisasi ini dilaksanakan secara tatap muka pada hari Selasa, 28 oktober 2025 yang bertempat di Aula Kantor Desa Tanjung Baru Ranau dan dihadiri oleh Kepala Desa serta 14 aparatur pemerintah desa yang aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dalam kegiatan ini, tim PkM memberikan penjelasan mengenai konsep dasar literasi digital, aspek keamanan informasi, penggunaan perangkat digital secara produktif, serta penerapannya dalam administrasi pemerintahan desa.



Gambar 2. Sosialisasi Literasi Digital

Selain penyampaian materi, tim juga membagikan buku panduan “Pemanfaatan Internet dan UMKM dalam pengembangan Desa Cerdas” yang disusun khusus sebagai referensi bagi aparatur Desa Tanjung Baru Ranau. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana internet dapat digunakan secara efektif dalam mendukung tugas pemerintahan desa sekaligus mendorong pengembangan UMKM lokal sebagai bagian dari konsep *desa cerdas* (*smart village*).



Gambar 3. Penyerahan Buku Panduan Pemanfaatan Internet dan UMKM dalam Pengembangan Desa Cerdas

Morrison menegaskan bahwa *capacity building* merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu pada upaya meningkatkan kompetensi teknis, profesionalisme, dan responsivitas individu terhadap perubahan (Morrison, 2001). Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi literasi digital yang diberikan kepada aparat pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau merupakan bentuk penguatan kapasitas pada dimensi sumber daya manusia (SDM), di mana peserta memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman terhadap teknologi informasi. Penyediaan buku panduan “Pemanfaatan Internet dan UMKM dalam pengembangan Desa Cerdas” juga menjadi instrumen pendukung pembelajaran berkelanjutan, yang sangat relevan dalam kerangka *capacity building*.

Temuan ini sejalan dengan studi Mergel, (2018) yang menekankan bahwa *capacity building* dalam konteks transformasi digital sektor publik memerlukan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Peningkatan literasi digital aparat desa dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal terbukti efektif dalam mempercepat adopsi teknologi serta meningkatkan kesiapan aparat dalam menjalankan layanan publik berbasis digital.

Pada saat yang sama, konsep literasi digital menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas aparat desa di era digital. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan memahami informasi, mengevaluasi kredibilitasnya, menjaga keamanan data, serta memanfaatkan teknologi secara etis dan produktif. Dengan meningkatnya peran teknologi dalam pelayanan publik, literasi digital menjadi kompetensi wajib bagi aparat desa agar mampu mengelola administrasi pemerintahan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Materi sosialisasi yang meliputi pengenalan konsep literasi digital, etika digital, keamanan informasi, dan pemanfaatan aplikasi digital dalam pengelolaan desa, menjadi bukti adanya upaya peningkatan literasi digital sebagai bagian integral dari program *capacity building*.

3.2. Penyediaan Infrastruktur Teknologi

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas digital, tim PkM tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menyediakan dukungan sarana teknologi dalam bentuk modem Orbit Pro H2, sebuah perangkat teknologi tepat guna untuk meningkatkan konektivitas internet desa. Penyerahan perangkat ini dilakukan pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 setelah kegiatan sosialisasi literasi digital selesai dilaksanakan. Pemilihan modem Orbit Pro H2 didasarkan pada pertimbangan kemampuan perangkat dalam menyediakan jaringan internet yang stabil, jangkauan sinyal yang kuat, serta kemudahan instalasi, sehingga sesuai untuk kebutuhan operasional kantor desa, serta menambah dimensi lain dari *capacity building*, yaitu dimensi penguatan organisasi dan kelembagaan. Dengan dukungan teknologi yang memadai, pemerintah desa memiliki sarana dasar yang memungkinkan penerapan Sistem Informasi Desa (SID), pelayanan administrasi digital, komunikasi berbasis internet, serta peningkatan efisiensi kerja aparat. Infrastruktur digital menjadi faktor penentu dalam keberhasilan transformasi digital, karena kompetensi SDM saja tidak cukup tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, penyediaan modem tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan bagian dari strategi penguatan kapasitas kelembagaan desa.



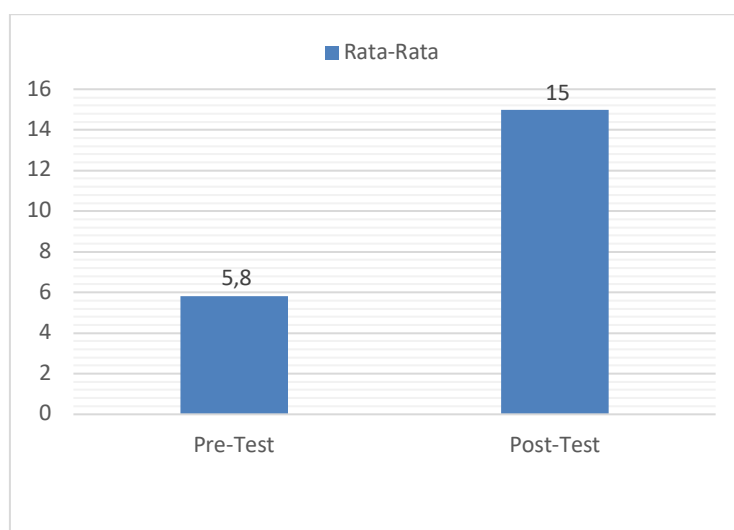
Gambar 4. Penyerahan Infrastruktur Teknologi (Modem Orbit Pro H2)

Dengan adanya perangkat modem Orbit Pro H2 tersebut, pemerintah desa kini memiliki akses internet yang lebih memadai guna menunjang aktivitas administratif, layanan publik, dan komunikasi digital. Infrastruktur ini menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi sistem administrasi desa berbasis digital yang profesional dan transparan.

Hasil ini memperkuat argumen Gil-Garcia et al., (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan sangat ditentukan oleh integrasi antara kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur seperti akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang sesuai, implementasi sistem digital di sektor publik cenderung tidak optimal dan berisiko mengalami kegagalan atau tidak berkelanjutan.

3.3. Evaluasi

Proses evaluasi dilakukan melalui metode *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* diberikan sebelum kegiatan dimulai untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, sedangkan *post-test* diberikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital aparatur desa. Gambar 5 menunjukkan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Keduanya menggunakan soal yang sama, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) pertanyaan dengan 2 (dua) pilihan jawaban. Materi *pre-test* dan *post-test* meliputi pengetahuan tentang literasi digital dan manfaat infrastruktur teknologi dalam meningkatkan akses internet.



Gambar 5. Diagram Perbandingan Nilai Rata-rata *Pre-Test* dan *Post-Test*

Sebagaimana terlihat pada gambar 5, hasil evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, baik dari aspek pemahaman peserta dalam kegiatan sosialisasi. Nilai rata-rata *pre-test* adalah sebesar 5,8 sedangkan nilai rata-rata *post-test* adalah 15. Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah diadakannya sosialisasi serta menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis konteks lokal efektif, namun keberlanjutan bergantung pada dukungan infrastruktur dan komitmen kelembagaan. Peningkatan tersebut juga menegaskan bahwa literasi digital dapat ditumbuhkan melalui intervensi edukatif yang tepat, relevan, dan disesuaikan dengan kebutuhan aparatur desa. Dengan kata lain, kegiatan PkM ini telah berhasil mengintegrasikan konsep *capacity building* dan literasi digital dalam satu rangkaian yang berkesinambungan. Hasil evaluasi akan menjadi indikator keberhasilan kegiatan PkM sekaligus dasar untuk penyusunan rekomendasi tindak lanjut bagi desa.

Peningkatan nilai *pre-test* dan *post-test* menunjukkan efektivitas pendekatan integratif antara edukasi dan penyediaan teknologi. Temuan ini sejalan dengan penelitian J.E. Fountain, (2022)) yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas digital dalam sektor publik akan lebih efektif dilakukan melalui kombinasi antara pelatihan kompetensi dan dukungan sistem teknologi yang memadai, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku organisasi dan peningkatan kinerja layanan publik.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas digital aparatur desa melalui sosialisasi literasi digital dan penyediaan infrastruktur teknologi mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur secara signifikan, yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai rata-rata dari 5,8 menjadi 15. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan terintegrasi antara edukasi dan dukungan infrastruktur efektif dalam mendorong transformasi digital di tingkat desa. Ke depan, diperlukan upaya keberlanjutan melalui pembentukan tim pengelola teknologi desa, peningkatan intensitas pelatihan lanjutan, serta integrasi sistem digital dalam layanan administrasi desa agar dampak program dapat berkelanjutan dan lebih optimal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya atas dukungan pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, skema Pengabdian Berbasis Masyarakat yang diberikan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNSRI berdasarkan SK Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0014/UN9/SK.LPPM.PM/2025, dan partisipasi aktif perangkat Desa Tanjung Baru Ranau selaku mitra PkM.

Daftar Pustaka

- Akbar, M., & Wijaya, G. (2024, June 19). *Digital Literacy of Rural Areas in Indonesia: Challenges and Opportunities*. <https://doi.org/10.4108/eai.1-11-2023.2344347>
- Dian Pratama, Eny Haryati, & Dian Ferriswara. (2025). Digitization of Population Administration Services : Analysis of the Need to Improve Digital Literacy of Village Government Apparatus. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(1), 26–39. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i1.507>
- Fitri Rahmadany, A. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 195–209. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i2>
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: finding the crossroads. In *Public Management Review* (Vol. 20, Number 5). <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>
- Gunawan, H., Alfitri, Lionardo, A., Thamrin, M. H., & Perdana, D. A. (2025). Mapping the Intellectual Landscape of Digital Governance: Trends, Thematic Development, and Global Research Networks. *Architecture Image Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.441>
- Heeks, R., & Santos, R. (2020). Understanding Adoption of e-Government: Principals, Agents and Institutional Dualism. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3540039>

- J.E. Fountain, J. E. (2022). The moon, the ghetto and artificial intelligence: Reducing systemic racism in computational algorithms. *Government Information Quarterly*, 39.0(2). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101645>
- Kanni, W. (2009). Capacity Development: A UNDP Primer. *Undp*.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the Web. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 371(1987). <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382>
- Marzuki A, & Dewi IS. (2023). Transformasi Digital dan Pemerintah Desa: Analisis Kesiapan dan Strategi Penguatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 45–59.
- Maulana, R. Y., Subekti, D., Yusuf, M., & Berianysah, A. (2024). Penguatan Kapasitas Digital dalam Menghadapi Transformasi Digital untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Dinda Syufradian Putra. *Journal of Rural Community Development Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 01(02). <https://doi.org/10.22437/jrcd.v1i2.13>
- Mergel, I. (2018). Open innovation in the public sector: drivers and barriers for the adoption of Challenge.gov. *Public Management Review*, 20(5), 726–745. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1320044>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Morrison, T. (2001). Actionable Learning: A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning. In *Asian Development Bank Institute*.
- Perdana, D. A., & M. Husni Thamrin. (2025). Administrasi Keuangan Publik dalam Perspektif Global: Analisis Bibliometrik dan Tematik Tahun 1985–2025. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 4(2 SE-Articles).
- Permana, D. (2023). Dynamics of Public Policy in the Digital Era: A Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. In *International Journal Publishing INFLUENCE: International Journal of Science Review* (Vol. 5, Number 3).
- Rio Yusri Maulana. (2022). COLLABORATIVE DIGITAL TRANSFORMATION PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1784>
- S. Hasanah, S., I.N. Pratama, I. N., A.F. Rahmat, A. F., & C. Kurniawan, C. (2023). DIGITAL GOVERNMENT IN SOCIAL SCIENCES DISCIPLINE: MAPPING PIVOTAL FEATURES AND PROPOSED THEORETICAL MODEL. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11.0(1), 195–220. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.819>
- Septiana, A. R., Alauddin, M. R. S., Triani, N., Zahari, A. F. M., Maulid, La Ode Asrun Azis R, & Niar Astaginy. (2022). Sosialisasi Pemanfaatan Media Digital Dalam Meningkatkan Kapasitas Keuangan Desa di Desa Wulonggere Kabupaten Kolaka. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.53860/losari.v4i2.109>
- van Dijk, J. A. G. M. (2005). The deepening divide: Inequality in the information society. In *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*. <https://doi.org/10.4135/9781452229812>
- Yusuf M, & Andini R. (2023). Digital Transformation In Rural Areas: A Case Study of Computer Training for Village Officials. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 201.